

# RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025



Kementerian Perindustrian Republik Indonesia  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri  
Balai Diklat Industri Denpasar

# Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugrah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kinerja (Renkin) BDI Denpasar tahun 2025 dapat diselesaikan

Penyusunan Renkin ini adalah implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BDI Denpasar yang didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 dan 146/M-IND/Kep/3/2014 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang dituangkan dalam bentuk kegiatan bidang operasional maupun bidang pembinaan dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BDI Denpasar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renkin ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan-masukan yang konstruktif.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renkin) BDI Denpasar dan semoga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.





# Daftar Isi

	Halaman
<b>Pengantar</b>	i
<b>BAB I Pendahuluan</b>	<b>3</b>
Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri	1
Arah Kebijakan Pembangunan SDM Industri	3
Maksud dan Tujuan	9
Landasan Penyusunan	9
Tugas Pokok dan Fungsi	9
Tugas Pokok dan Fungsi	15
<b>BAB II Pembangunan Industri dan Sasaran Strategis</b>	<b>15</b>
Visi, Misi dan Tujuan	15
Aspek Strategis Organisasi	18
Rencana Kinerja dalam Alur Perencanaan	21
Arah Kebijakan	21
<b>BAB III Rencana Kinerja Tahun 2025</b>	<b>24</b>
Perjanjian Kinerja 2025	24
Program dan Anggaran	26
Rencana Aksi	26
<b>BAB IV Penutup</b>	<b>31</b>
<b>Lampiran</b>	<b>32</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

#### 1.1.1 Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri

Tahun 2023 jumlah angkatan kerja (Total of Labour Force) Indonesia adalah sebanyak 147.707.452<sup>[1]</sup> orang atau 53 persen dari total penduduk Indonesia tahun 2023. Dari jumlah angkatan kerja, 139.852.377 orang atau 94,68 persen berstatus bekerja, sedangkan sisanya sebanyak 5,32 persen berstatus pengangguran.

Pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya laju pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan, serta adanya kesenjangan keterampilan SDM dengan kebutuhan industri saat ini.

---

[1] Badan Pusat Statistik (2024). Statistik Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Dalam satu dekade (2013 - 2023) Jumlah angkatan kerja Indonesia tumbuh sebanyak 29.514.674 orang, atau 24,97 persen.

Keterangan	2013[2]	2023[3]	Perubahan
Jumlah angkatan kerja (orang)	118.192.778	147.707.452	29.514.674
Bekerja (orang)	110.804.041	139.852.377	29.048.336
Persentase Bekerja	93,74	94,68	0,94
Persentase Menganggur	6,26	5,32	-0,94

Alih-alih turun, data statistik menunjukkan bahwa selama satu dekade persentase bekerja justru meningkat sebesar 0,94 persen. Data ini memberi gambaran bahwa selama 10 tahun Pemerintah cenderung dapat menyediakan lapangan pekerjaan, yang menyerap angkatan kerja.

Bila data ini ditelaah berdasarkan komposisi Status Pekerjaan Utama (Main Employment Status), ternyata peningkatan signifikan terjadi pada jumlah angkatan kerja yang membuka usaha, yakni meningkat 3,28%, tumbuh 500% dibandingkan Buruh/Karyawan/Pegawai yang hanya tumbuh 0,65%. Ada kemungkinan angkatan kerja tumbuh merambah sektor-sektor informal, karena ketidadaan lapangan pekerjaan di sektor formal, atau malah karena Pemerintah telah berhasil menciptakan peluang bagi usaha kecil dan industri kreatif.

Keterangan	2013[2]	2023[3]	Perubahan
Berusaha	37,12%	40,39%	+3,28%
Buruh/Karyawan/ Pegawai	37,03%	37,68%	+0,65%
Pekerja Bebas	9,95%	8,99%	-0,96%
Pekerja Keluarga/ Tidak dibayar	15,90%	12,93%	-2,97%

Lalu bagaimana dengan pertumbuhan sektor manufaktur? Selama 1 dekade jumlah SDM yang bekerja di sektor manufaktur tumbuh 29,9%

Keterangan	2013[2]	2023[3]	Perubahan	Perubahan %
Jumlah Bekerja sektor manufaktur	14.883.817	19.342.332	4.458.515	+29,9%

[2]Badan Pusat Statistik (2014). Statistik Indonesia 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik

[3]Badan Pusat Statistik (2024). Statistik Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Jumlah ini bila ditelaah berdasarkan status pekerjaan utamanya (*Main Employment Status*), memperlihatkan bahwa dalam satu dekade, pertumbuhan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai buruh / karyawan / pegawai sektor manufaktur hanya tumbuh 8,32%, sedangkan SDM yang membuka lapangan usaha sendiri di sektor manufaktur tumbuh 88,60%. Hal ini memperkuat indikasi bahwa pertumbuhan serapan angkatan kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai di sektor manufaktur tumbuh tidak sepesat kategori status pekerjaan utama lainnya.

Keterangan	2013[2]	2023[3]	Perubahan	Perubahan%
Berusaha	3.168.506	5.975.780	2.807.274	88,60%
Buruh/Karyawan/ Pegawai	9.995.378	10.827.030	831.652	8,32%
Pekerja Bebas	559.388	856.481	297.093	53,11%
Pekerja Keluarga/ Tidak dibayar	1.160.545	1.684.041	523.496	45,11%

Apakah ini buruk? belum tentu, kita perlu melihat pertumbuhan PDB per kapita dari sektor manufaktur dalam satu dekade. Dengan memperhitungkan faktor inflasi, maka perbandingan PDB menggunakan constant price 2010 untuk keperluan komparasi lintas tahun.

Keterangan	2013[2]	2023[3]	Perubahan	Perubahan%
PDB sektor Manufaktur (Rp Triliun)	2.032	2.507	475	23,37%
Jumlah Penduduk (Juta jiwa)	248,8	278,7	29,9	12,01%
PDB per Kapita dari sektor Manufaktur	8.167.203	9.017.985	850.782,4	10,4%

Dalam satu dekade PDB perkapita dari sektor manufaktur hanya tumbuh 10,4%. Bila dihubungkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja di sektor manufaktur selama 2013-2023, maka pertumbuhan jumlah angkatan kerja total sebanyak 29,9%, atau pertumbuhan Berusaha sebesar 88,6% tidak terlalu terlihat dampaknya pada pertumbuhan PDB per kapita dari sektor manufaktur. Penyebabnya perlu di analisa lebih jauh, namun ada kemungkinan karena tingkat produktivitas SDM yang rendah.

[2]Badan Pusat Statistik (2014). Statistik Indonesia 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik

[3]Badan Pusat Statistik (2024). Statistik Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu indikator penting yang terkait langsung dengan pertumbuhan, daya saing, dan standar hidup perekonomian suatu negara. Angka produktivitas tenaga kerja mewakili total volume output (GDP) yang dihasilkan per unit tenaga kerja atau per jumlah jam kerja.

Indikator ini memberikan gambaran umum tentang efisiensi dan kualitas sumber daya manusia dalam proses produksi. Di tahun 2022 (November) nilai Output-per-Worker Indonesia ada di peringkat 125 dari 190 negara, berada di bawah Philipina (rangking 123), Srilanka (rangking 117), Thailand (rangking 111), dan Malaysia (rangking 69). Diantara 11 anggota ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-6 dengan nilai Output-per-worker sebesar USD 8478,5[4], berada di bawah Output-per-worker ASEAN (USD 9737,7), di bawah Output-per-worker G20 (USD 34.515,3). Meski rendah namun nilai Output-per-worker Indonesia tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,83% dari tahun 2021 (YoY), 11,42% dari tahun 2017 (5Y) dan sebesar 33,81% dari tahun 2012 (10Y), hal ini menunjukkan bahwa setidaknya selama 10 tahun terakhir ini kita berada dalam track yang benar, dan upaya akselerasi atau percepatan harus terus diupayakan.

Kualitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan nasional. Tenaga kerja harus memiliki kemampuan yang memadai dan kompetitif. Kualitas tenaga kerja yang kompeten tersebut perlu dibangun melalui pendidikan. Data statistik Industri Manufaktur Indonesia tahun 2023 menunjukkan 61,01%[5] tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan terakhir SD, SMP atau SMA; 28,31% lulusan SMK; 3,56% lulusan DI-DIV; hanya 7,12% tenaga kerja Industri Manufaktur memiliki tingkat pendidikan terakhir S1, S2, atau S3. Dari data tersebut kita mendapat gambaran kualitas pendidikan dari tenaga kerja di Indonesia masih cenderung rendah. Selain rendahnya tingkat pendidikan, salah satu permasalahan tenaga kerja di Indonesia adalah ketidaksesuaian (mismatch) antara tingkat pendidikan dengan dunia kerja. Tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan tertentu semestinya bekerja pada dunia kerja yang sesuai dengan keahliannya, dengan demikian diharapkan produktivitas tenaga kerja dapat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas tak lepas dari upaya perbaikan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Sebab itu, di 2024 pemerintah akan berfokus antara lain pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting.

Berbagai indikator menunjukkan perbaikan kualitas SDM di Indonesia misalnya penurunan tingkat pengangguran dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19% pada September 2021. Begitupun dengan kemiskinan ekstrem yang turun 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023.

---

[4] International Labour Organization (2022). Output per Worker. Nov.2022 - Annual. ILOSTAT

[5] Badan Pusat Statistik (2023). Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik

## 1.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan SDM Industri

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada berbagai kegiatan salah satunya peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah – tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan pada tahun 2025, sesuai tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2025, maka ditetapkan 7 agenda pembangunan, salah satunya adalah agenda untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pembangunan SDM Industri diarahkan untuk berfokus pada upaya:

Memperkuat dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi struktur Industri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana</li><li>• Pembentukan tempat uji kompetensi (TUK)</li><li>• Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi</li><li>• Pembentukan Teaching Factory</li><li>• Workshop terintegrasi</li><li>• Pembentukan inkubator bisnis</li></ul>
Mengembangkan infrastruktur kompetensi bidang industri prioritas melalui	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan dan penetapan SKKNI</li><li>• Peningkatan jumlah asesor kompetensi dan lisensi</li></ul>
Mendorong dan memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta</li><li>• Penumbuhan wirausaha industri.</li><li>• Pendirian dan pengembangan pendidikan vokasi industri pada perwilayahannya industri, khususnya di luar pulau Jawa</li></ul>
Mempercepat sistem sertifikasi tenaga kerja industri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi sertifikasi kompetensi, dan penetapan sistem sertifikasi wajib</li></ul>

[2] International Labour Organization (2022). Output per Worker. Nov.2022 - Annual. ILOSTAT

[3] Badan Pusat Statistik (2023). Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Sejalan dengan arah kebijakan pembagunan SDM Industri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) menetapkan arah kebijakan yang menjadi fokus unit pendidikan vokasi dan balai diklat industri dalam periode 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Mempelopori dan menjadi rujukan Pendidikan Vokasi Industri dan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi, dengan kriteria dan langkah pengembangan sebagai berikut:
  - a. Kurikulum berbasis kompetensi mengacu pada SKKNI bidang Industri;
  - b. Link and match dengan kebutuhan dunia usaha Industri
  - c. Menggunakan modul pembelajaran berbasis kompetensi (setiap paket modul terdiri dari; buku kerja, buku informasi, dan buku penilaian, serta sistem pembelajaran computer-based test (CBT)
  - d. Memiliki teaching factory, LSP, TUK
  - e. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap siswa / mahasiswa dan lulusan
  - f. Memiliki kerjasama dengan dunia usaha industri dalam rangka penyusunan kurikulum, pemagangan industri, dan penempatan kerja lulusan
  - g. Lulusannya dapat berkiprah/bersaing secara nasional dan internasional dengan kompetensi yang dimiliki; dan
  - h. Peningkatan kompetensi ASN melalui diklat dan program rintisan gelar
2. Mengembangkan spesialisasi yang menjadi fokus pengembangan
3. Membangun persepsi dan pandangan masyarakat tentang pendidikan vokasi
4. Mengembangkan workshop / laboratorium yang terintegrasi dengan konsep ruang pendidikan yang moderen
5. Mengembangkan prodi dan meningkatkan jenjang program pendidikan politeknik
6. Meningkatkan jumlah Mahasiswa / Siswa, minimal memenuhi kapasitas optimal yang dinilai layak dari sisi APBN
7. Mengembangkan inkubator bisnis
8. Menyelenggarakan pelatihan industri dengan sistem 3 in 1; dan
9. Mendirikan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri di setiap Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Dalam pelaksanaannya, pembangunan tenaga kerja industri memerlukan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik lembaga pendidikan dan pelatihan, pelaku usaha industri, asosiasi industri, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi profesi serta pemerintah yaitu Kementerian terkait dan lembaga pemerintah lainnya.

---

[2] International Labour Organization (2022). Output per Worker. Nov.2022 - Annual. ILOSTAT

[3] Badan Pusat Statistik (2023). Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pasal 16 dinyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri.

Pembangunan sumber daya manusia industri sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat, dengan memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Sumber daya manusia industri yang dimaksud meliputi; wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri, sehingga kebijakan pembangunan sumber daya manusia industri dilaksanakan untuk memberdayakan elemen-elemen tersebut.

1. Pembangunan Wirausaha Industri, Pembangunan wirausaha industri dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta memiliki kompetensi sesuai bidang usahanya, meliputi; kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kreativitas dan inovasi. Upaya pembangunan wirausaha industri dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Inkubator industri;
  - c. Kemitraan;
2. Pembangunan tenaga kerja industri dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial. Pembangunan tenaga kerja industri dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pendidikan dan pelatihan (diklat); dan
  - b. Pemagangan, yang dapat diikuti oleh tenaga kerja maupun calon tenaga kerja.
3. Pembangunan Pembina Industri, Pembangunan pembina Industri dilakukan untuk menghasilkan pembina industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan industri yang meliputi kompetensi teknis, dan kompetensi manajerial. Pembangunan pembina industri dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pendidikan dan pelatihan (diklat); dan
  - b. Pemagangan
4. Konsultan industri merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku industri dan pembina industri.

Pemerintah melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan / atau jasa industri untuk diekspor.

Untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang dimaksud di atas pemerintah melakukan tiga hal berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas.

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:

- peningkatan kompetensi sumber daya manusia
- bantuan dan bimbingan teknis
- bantuan bahan baku dan bahan penolong
- bantuan mesin atau peralatan
- pengembangan produk
- bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau
- bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran
- akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru
- penyediaan kawasan Industri untuk industri kecil dan industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
- pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, dan industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Pada awal terbentuk tahun 1984, BDI Denpasar bernama Balai Latihan Industri yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan diklat bagi pegawai departemen perindustrian, dengan cakupan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, Irian Jaya, dan Timor-timur.

Kemudian pada tahun 2006, berubah nama menjadi Balai Diklat Industri Regional VI Denpasar yang merupakan Balai Diklat Industri aparatur dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat.

Tahun 2014, berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor: 09/SJ-IND/PER/10/2012 tentang Reposisi Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan Industri, maka Balai Diklat Industri Regional VI Denpasar berubah menjadi Balai Diklat Industri Denpasar dengan lingkup pelayanan nasional dan berbasis kompetensi, dengan spesialisasi di bidang industri kreatif, khususnya animasi, kerajinan dan barang seni.

Pada tahun 2022, sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI).

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014, maka spesialisasi kompetensi BDI Denpasar dalam menyelenggarakan diklat bagi SDM industri meliputi animasi, kerajinan, dan barang seni. Sejalan dengan perkembangan industri nasional dan global serta dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, maka melalui Keputusan Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian Nomor: 727 Tahun 2020, spesialisasi prioritas Balai Diklat Industri Denpasar dikembangkan meliputi animasi, digital content, dan industrial internet of things (IIOT), serta spesialisasi penunjang industri berbasis aplikasi, pengembangan permainan, dan kriya. Terdapat pula Keputusan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nomor 212 Tahun 2024 tentang penambahan spesialisasi hilirisasi minyak atsiri pada Balai Diklat Industri Denpasar.

Dalam rangka meningkatkan peran pendidikan dan pelatihan vokasi dalam pembangunan sumber daya manusia industri yang kompeten dan berdaya saing global untuk mendorong pertumbuhan industri, maka terbitlah Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju Corporate University BPSDMI Kementerian Perindustrian, menanamkan visi baru kepada Balai Diklat Industri, yang mana Balai Diklat Industri harus menjadi center of excellences dalam pembangunan SDM industri melalui jalur pelatihan vokasi industri, sesuai bidang spesialisasinya masing-masing.

Tabel 1.1 – Bidang Spesialisasi BDI Denpasar

Bidang Telematika dan Aneka	
Prioritas	Penunjang
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Animasi</li> <li>• Digital Content</li> <li>• Industrial Internet of Things</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri Berbasis Aplikasi</li> <li>• Pengembangan Permainan</li> <li>• Kriya</li> <li>• Minyak Atsiri</li> </ul>



Gambar 1.1 – Tiga Sasaran Pengembangan BDI

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1009 Tahun 2021, pengembangan BDI Denpasar wajib selaras dengan kebijakan Corporate University tersebut, maka pengembangan BDI Denpasar memiliki tiga sasaran:

- Pengembangan SDM industri yang bertaraf global
- Sinergi dalam penyelenggaraan inkubator bisnis
- Membuka akses pasar bagi inovasi produk industri kreatif

Untuk mencapai sasaran tersebut BDI Denpasar membutuhkan sinergi dengan pihak eksternal lainnya (stakeholder) yang terdiri dari pelaku industri, asosiasi, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya.

Kegiatan BDI Denpasar untuk mewujudkan sasaran Corporate University tersebut mencakup:

Tabel 1.2 – Sasaran dan Kegiatan Corporate University

Sasaran	Kegiatan
Pengembangan SDM Industri yang Bertaraf Global	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan</li><li>• Mengembangkan modul pelatihan berbasis kompetensi</li><li>• Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1</li><li>• Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP</li><li>• Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional</li><li>• Membangun dan mengembangkan smart facilities</li><li>• Melaksanakan pelatihan bagi ASN atas penugasan BPSDMI</li></ul>
Membuka Akses Pasar bagi Inovasi Produk Kreatif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengembangkan innovation hub produk digital creative, dan barang seni sebagai tempat pameran, demo product, business matching</li><li>• Mengembangkan makerspace sebagai co-working space, prototyping facilities, dan production facilities</li></ul>
Sinergi dalam Penyelenggaraan Inkubator Bisnis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan kolaborasi kegiatan pendampingan usaha dengan instansi / inkubator bisnis lain</li><li>• Meluncurkan klinik konsultasi bisnis untuk umum</li><li>• Memperkuat komunitas kewirausahaan</li><li>• Melaksanakan kegiatan pre-startup program</li><li>• Melaksanakan kegiatan startup program</li><li>• Melaksanakan kegiatan kewirausahaan</li><li>• Menyelenggarakan festival/eksebisi produk kewirausahaan</li></ul>

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 disusun sebagai bentuk UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu RKT BDI Denpasar tahun 2022 disusun untuk memastikan perencanaan kinerja BDI Denpasar sesuai dengan Renstra BDI Denpasar tahun 2020 – 2024 Revisi II

## 1.3 Landasan Penyusunan

- 1.Undang – undang Nomor 25 Tahun2004 tanggal 05 Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 05 Februari 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 dan Keputusan MenteriPerindustrian Nomor 146/M-IND/Kep/3/2014 tentang Pemberdayaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Denpasar sebagai Pusat Pengembangan Industri Kreatif; dan
- 5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- 6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan PelatihanIndustri

## 1.4 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Denpasar yang selanjutnya disebut BDI Denpasar adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, tanggal 21 Februari 2022, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, tugas Balai Diklat Industri:

### Pasal 2

*Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri*

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, tanggal 21 Februari 2022, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, fungsi Balai Diklat Industri:

Pasal 3	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur</li><li>2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri dan wirausaha industri yang berbasis spesialisasi dan kompetensi</li><li>3. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja industri</li><li>4. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi kewirausahaan industri</li><li>5. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri</li><li>6. Pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri</li><li>7. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, karsipan, dan rumah tangga; dan</li><li>8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan</li></ol>
---------	---

Struktur organisasi BDI Denpasar dipimpin oleh Kepala Balai yang membawahi perangkat kerja yang terdiri atas:

### 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, karsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

### 2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BDI Denpasar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional di BDI Denpasar terdiri dari:

Tabel 1.3- Jabatan Fungsional di BDI Denpasar

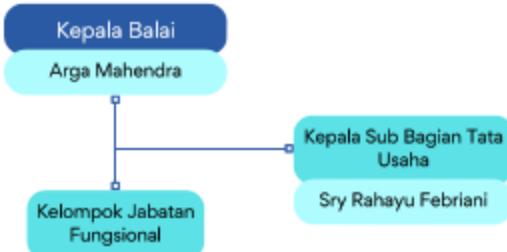
No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
2	Analis Perencanaan	1
3	Arsiparis Ahli Pertama	1
4	Instruktur Ahli Pertama	6
5	Instruktur Mahir	1

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
6	Operator Layanan Operasional	2
7	Pelaksana	1
8	Pembina Industri Ahli Madya	1
9	Pembina Industri Ahli Muda	1
10	Penata Laksana Barang Terampil	1
11	Penata Layanan Operasional	1
12	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	1
13	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1
14	Pengolah Data dan Informasi	2
15	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1
16	Pranata Humas Ahli Pertama	1
17	Pranata Humas Terampil	1
18	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
19	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
20	Pranata Komputer Terampil	1
21	Widyaiswara Ahli Madya	1
22	Widyaiswara Ahli Muda	1

Sesuai Pasal 6 ayat (2) dan (3), BDI Denpasar memiliki pejabat fungsional yang merangkap sebagai koordinator:

- Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi, dan sertifikasi, penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- Koordinator Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan workshop / teaching factory / inkubator bisnis

Bagan Susunan Organisasi BDI Denpasar sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 ditunjukkan Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2 - Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Denpasar TA 2024

## Ruang Lingkup

Sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 bahwa penyusunan Rencana Kerja di tingkat Kementerian / Lembaga diikuti oleh semua satuan kerja di dalamnya, untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan dalam mewujudkan target sasaran yang telah ditetapkan. BDI Denpasar menyusun RKT 2024 meliputi sasaran dan tindakan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.1 berikut

*Tabel 1.4 – Sasaran dan Rencana Tindak*

	<b>Sasaran</b>	<b>Rencana Tindak</b>
1	Terwujudnya spesialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri pada wilayah pusat pertumbuhan industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta kebutuhan tenaga kerja baik jumlah, jenis, dan kompetensinya sesuai spesialisasi masing-masing</li> <li>2. Membuat penyiapan tenaga kerja yang selaras dengan rencana pengembangan industri prioritas</li> <li>3. Menyusun dan mengembangkan standar kompetensi sesuai dengan spesialisasi</li> <li>4. Pengembangan dan penguatan kelembagaan sebagai center of excellences</li> <li>5. Mengembangkan sistem informasi data pelatihan (alumni, penempatan kerja, wirausaha)</li> </ol>
2	Tersusunnya program dan modul Pelatihan Berbasis Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan program paket pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri</li> <li>2. Menyusun program pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi yang berorientasi pada future job (green job/skill, digital, dan kreatif)</li> <li>3. Menyusun modul pelatihan berbasis kompetensi (buku materi dan buku assesment)</li> <li>4. Menyusun panduan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi yang profesional</li> <li>5. Membangun sarana dan prasarana pelatihan yang modern dan memadai</li> </ol>

	<b>Sasaran</b>	<b>Rencana Tindak</b>
3	Terselenggaranya pelatihan (skilling, upskilling, reskilling) berbasis spesialisasi dan kompetensi tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan dan menguatkan kerjasama dengan stakeholder terkait</li> <li>2. Melakukan rekrutmen peserta pelatihan bersama dengan asosiasi, industri, dan Pemda</li> <li>3. Menerapkan manajemen pelatihan yang profesional</li> <li>4. Menyusun perencanaan kebutuhan instruktur baik dari institusi maupun dari industri</li> <li>5. Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi teknis instruktur</li> <li>6. Mengembangkan sistem dan metode penyelenggaraan secara online, offline, insite, dan onsite</li> <li>7. Menyelenggarakan pelatihan berbasis spesialisasi kompetensi (skilling, upskilling, reskilling) tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1</li> <li>8. Melakukan evaluasi dan uji kompetensi</li> <li>9. Menerbitkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi</li> <li>10. Memastikan penempatan kerja lulusan pelatihan</li> <li>11. Mengembangkan dan melaksanakan sistem dan metode penelusuran lulusan pelatihan (tracer study)</li> <li>12. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pasca pelatihan untuk memastikan kompetensi lulusan, produktifitas kerja, retensi (turnover) lulusan pelatihan</li> </ol>
4	Terwujudnya pengembangan skema kompetensi dan uji kompetensi sesuai dengan spesialisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan skema kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi asesor teknis dan metodologi assesment</li> <li>3. Menyiapkan dokumen surveillance LSP P1</li> <li>4. Mengembangkan sistem digitalisasi uji kompetensi</li> <li>5. Mengembangkan materi uji kompetensi (MUK)</li> <li>6. Membangun dan mengembangkan TUK</li> </ol>
5	Terwujudnya pengembangan sertifikasi kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jejaring kerja dengan lembaga internasional di bidang pelatihan vokasi</li> <li>2. Sertifikasi internasional instruktur dan lulusan</li> <li>3. Memiliki authorized training body</li> <li>4. Kegiatan penjaminan mutu pelatihan berbasis kompetensi</li> </ol>

	<b>Sasaran</b>	<b>Rencana Tindak</b>
6	Terwujudnya inkubator bisnis industri terintegrasi	<p>1. Membentuk kelembagaan inkubator bisnis seesuai dengan spesialisasinya masing-masing</p> <p>2. Menyusun panduan pengelolaan inkubator bisnis</p> <p>3. Menjalin kemitraan dengan para stakeholder terkait (Ditjen, Pembina Industri, BDI, Politeknik, asosiasi, pelaku industri, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah)</p> <p>4. Melaksanakan kegiatan inkubator bisnis yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perekutan Tenant</li> <li>b. Pelatihan, pendampingan, dan pembinaan tenant mulai dari pembentukan badan usaha sampai launching produk</li> <li>c. Kemampuan pemasaran</li> <li>d. Penyusunan rencana bisnis (business canvas)</li> <li>e. Pembangunan jejaring bisnis</li> </ul> <p>5. Membentuk wirausaha industri melalui dukungan para pemangku kepentingan (akademisi – bisnis – pemerintah - komunitas - lembaga funding)</p> <p>6. Menyelenggarakan business matching (temu bisnis)</p> <p>7. Melaksanakan monitoring pasca inkubasi</p>
7	Smart training facility	<p>1. Digitalisasi proses pelatihan (modul pembelajaran, e-learning, sistem informasi pelatihan, e- assesment)</p> <p>2. Digitalisasi sasrana pelatihan (ruang kelas, smart class, smart building, smart workshop, konversi pembelajaran analog menjadi digital)</p>



# **BAB II**

## **PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN RENCANA STRATEGIS**

### **2.1 Visi, Misi, dan Tujuan**

Salah satu prioritas Pemerintah dalam pembangunan sektor Industri yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, serta meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) sebagai induk organisasi Balai Diklat Industri Denpasar memiliki visi :

*Menjadi Vokasi Industri Bertaraf Global untuk Mendukung Pembangunan Industri Nasional yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh*

Sejalan dengan visi tersebut, BDI Denpasar juga senantiasa menjunjung nilai – nilai yang telah ditetapkan bagi pegawai Kemenperin yakni untuk menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan semangat bergotong royong, yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri di Indonesia. Nilai – nilai tersebut terdiri dari integritas, profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif. Lima nilai ini disebut sebagai INSAN OKE yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh semua aparatur Kementerian Perindustrian ketika bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan Industri Nasional.

## Misi

Misi BDI Denpasar merupakan cascading dari misi BPSDMI, terdapat 8 (delapan) misi pembangunan BPSDMI sebagai berikut :

- Mengembangkan pendidikan vokasi industri dual system bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional
- Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri
- Membangun Balai Diklat Industri sebagai Center of Excellences pembangunan tenaga kerja industri
- Membangun Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai hub dan ecosystem center industri 4.0
- Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri
- Membangun Digital ASN Talent Pool dan Knowledge Management Center sebagai Pusat Pembinaan ASN Pembina Industri
- Membangun pusat pengembangan (development center) infrastruktur kompetensi industri
- Membangun wadah (hub center) sinergi, kolaborasi, dan kerjasama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

Dari misi BPSDMI tersebut dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan BDI Denpasar sebagaimana yang terdapat dalam buku Corporate University BPSDMI, sebagai berikut:

- Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri bidang animasi, digital content, dan IOT

- Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi bidang animasi, digital content, dan IOT
- Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi (skilling, up-skilling, dan reskilling) tenaga kerja industri bidang animasi, digital content, dan IOT dengan sistem 3 in 1
- Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP
- Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional
- Membangun dan mengembangkan sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri digital dan kriya melalui penyelenggaraan inkubator bisnis
- Membangun dan mengembangkan smart training facility
- Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN Pembina Industri atas penugasan dari BPSDMI

## Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pendidikan dan pelatihan SDM Industri seperti disebutkan di atas, Balai Diklat Industri Denpasar menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Peta Strategis BDI Denpasar. Tujuan yang ingin dicapai oleh Balai Diklat Industri Denpasar yakni :

*Meningkatnya peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional*

Dengan indikator kinerja tujuan:

*Tersedianya SDM Industri yang Kompeten*

SDM yang dimaksud dalam indikator ini ini terdiri atas:

- Tenaga kerja industri diantaranya terdiri dari lulusan diklat 3 in 1 yang diadakan BDI Denpasar;
- Wirausaha industri merupakan jumlah orang yang mengikuti inkubator bisnis yang difasilitasi oleh BDI Denpasar

## 2.2 Aspek Strategis Organisasi

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, maka diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis.

BDI Denpasar menjabarkan tiap sasaran program dengan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 3 perspektif, yaitu Stakeholder Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Aspek strategis BDI Denpasar dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1 - Peta Strategi BDI Denpasar 2025

## A Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif pemangku kepentingan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terpengaruh dan memperoleh manfaat. Terkait dengan perspektif Pemangku Kepentingan terdapat 1 Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai, yakni:

Sasaran Kegiatan Pertama (SK1) yang akan dicapai yaitu **"Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Dalam Penumbuhan Sektor Industri Manufaktur"**, dengan indikator kinerja:

Kode	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target 2025
IK1.1	Persentase Lulusan Peserta Pelatihan yang Bekerja dalam 1 Tahun *	Persen	93
IK1.2	Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi*	Orang	153
IK1.3	Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh*	Tenant	7

(\*) Indikator Kinerja Utama

## B Perspektif Proses Internal

Perspektif proses internal berkaitan dengan proses menciptakan dan menyampaikan proporsi nilai pelanggan. Perspektif ini berfokus pada semua aktivitas dan proses utama yang diperlukan agar perusahaan unggul dalam memberikan nilai yang diharapkan oleh pelanggan baik secara produktif maupun efisien. Terkait Perspektif Proses Internal terdapat 1 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai yakni:

Sasaran Kegiatan Kedua (SK2) yang akan dicapai adalah **"Menguatnya Komponen Penunjang Produktivitas Industri"**, dengan indikator kinerja:

Kode	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target 2025
IK2.1	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	Persen	91

## C Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan adalah dasar dari setiap strategi dan berfokus pada aset tidak berwujud dari suatu organisasi, terutama pada keterampilan dan kemampuan internal yang diperlukan untuk mendukung proses internal yang menciptakan nilai. Terkait dengan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan terdapat 4 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai, yakni:

Sasaran Kegiatan Ketiga (SK3) yang akan dicapai adalah: **"Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Akuntabel serta Berorientasi pada Pelayanan Prima"**, dengan indikator kinerja :

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2025</b>
IK3.1	Nilai SAKIP	Nilai	80,1
IK3.2	Nilai Laporan Keuangan	Nilai	79
IK3.3	Nilai Profesionalitas ASN	Indeks	81,3
IK3.4	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indeks	94
IK3.5	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,25
IK3.6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	75
IK3.7	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	80
IK3.8	Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	Persen	50

## **2.3 Rencana Kinerja dalam Alur Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi**

Penyusunan RKT merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

## **2.4 Arah Kebijakan BDI Denpasar**

Peningkatan kompetensi tenaga kerja industri saat ini dihadapkan pada tantangan besar dan beraneka ragamnya kebutuhan pelatihan kerja di bidang telematika dan aneka. Hal ini terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan untuk merespon terjadinya disrupti di bidang tersebut. Pada saat yang sama juga harus merespon terjadinya ledakan penduduk usia produktif (bonus demografi) yang perlu disiapkan kompetensinya untuk dapat masuk di dunia kerja. Hal ini menuntut selalu dikembangkannya jenis dan sistem pelatihan yang dapat mengakomodir kebutuhan industri yang bergerak di bidang telematika dan aneka. Salah satunya dengan mengembangkan jenis pelatihan triple skilling yang mencakup:

1. Pelatihan skilling bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada calon tenaga kerja industri. Sasaran peserta pada pelatihan skilling adalah para calon tenaga kerja yang sedang tidak bekerja dan pada umumnya adalah mereka yang baru lulus pendidikan di SMA/SMK. Ruang lingkup jenis pelatihan skilling ini diutamakan pada peningkatan keahlian calon tenaga kerja di level pemula.
2. Pelatihan up-skilling ditujukan bagi para tenaga kerja industri untuk meningkatkan keahlian teknis mereka ke level yang lebih tinggi dari keahlian yang sudah dimiliki. Pelatihan jenis ini diharapkan dapat membekali tenaga kerja untuk memperoleh kompetensi pada jenjang karier yang lebih tinggi dari posisi mereka saat ini.
3. Pelatihan re-skilling bertujuan untuk menambah keahlian baru bagi para angkatan kerja ke bidang keahlian lain sesuai kebutuhan industri. Baik pelatihan up-skilling maupun re-skilling lebih fokus kepada tenaga kerja yang sudah bekerjakan sudah memiliki keahlian sebelumnya, ataupun mereka yang terdampak adanya pergeseran pekerjaan (job shifting).

Sistem penyelenggaraan pelatihan vokasi industri yang dikembangkan di BDI Denpasar adalah sistem 3 in 1 meliputi pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja bagi lulusan pelatihan. Sistem pelatihan yang diselenggarakan oleh BDI Denpasar berkolaborasi dengan lembaga pelatihan terakreditasi dan industri. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan kurikulum dan modul yang mengacu pada kompetensi sesuai kebutuhan industri agar terbentuk link and match antara lembaga pelatihan dengan perusahaan industri untuk menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten dan bekerja.

Selain tenaga kerja Industri, BDI Denpasar juga diarahkan untuk menyiapkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis dengan menjalin kemitraan pengelolaan inkubator bisnis dengan pihak lain seperti politeknik, asosiasi industri, komunitas industri, serta kementerian/lembaga terkait.

Lebih lanjut dalam Roadmap 2022-2026 BDI Denpasar diarahkan untuk menjadi:

### **1 Pusat Pengembangan SDM Industri Kreatif**

Selaras dengankebijakan pengembangan Corporate University (Corpu) di BDI Denpasar, pengembangan SDM Industri harus mampu menyiapkan tenaga kerja industri telematika dan aneka yang kompeten, baik untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional melalui diklat 3 in 1.

Selain melalui diklat 3 in 1, pengembangan SDM industri juga dapat dilakukan melalui konsep talent incubation. Talent incubation menitikberatkan pada penciptaan tenaga kerja yang memenuhi tiga aspek dasar pekerja, yakni skill, knowledge dan attitude. Berbeda dengan metode diklat yang menggunakan metode classical, talent incubation menggunakan pendekatan mentorial, dimana pihak industri menjadi mentor bagi peserta. Konsep talent incubation diimplementasikan dalam bentuk kegiatan magang industri dan teaching factory yang dikelola oleh BDI Denpasar dan mitra industri secara bersama-sama.

### **2. Inkubasi Bisnis Kreatif Digital, dan Barang Seni**

Inkubasi Bisnis BDI Denpasar melaksanakan kegiatan fasilitasi penumbuhan wirausaha baru, pengembangan produk,dan konsultasi bisnis.Program inkubator bisnis di BDI Denpasar dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni program entrepreneurship, start-up program, dan program akselerator.

Program entrepreneurship mencakup program kewirausahaan yang ditujukan untuk calon tenant, komunitas industri kecil menengah, maupun komunitas kewirausahaan di sekolah dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari kandidat potensial atau produk inovatif yang bisa diinkubasi dalam program start- up.

Program start-up merupakan program pendampingan tenant binaan secara intensif. Dalam program start-up, inkubator berperan sebagai mentor, fasilitator, dan evaluator bagi tenant binaannya. Tenant yang dibimbing kemudian dinilai capaianya berdasarkan key performance indicator yang ditetapkan sebelumnya.

Program akselerasi merupakan pengembangan dari program start-up yang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan start-up. Peserta program ini adalah start-up yang layak untuk scale-up. Peserta program ini tidak hanya alumni inkubasi bisnis BDI Denpasar, tapi dapat pula berasal dari inkubator bisnis lain yang sudah bekerjasama dengan BDI Denpasar. Pembinaan dalam program akselerasi difokuskan pada hal-hal yang diperlukan start-up untuk memperoleh pendanaan, dengan menggandeng investor dan lembaga keuangan. Program akselerasi juga melakukan pendampingan pasca pendanaan agar laju pertumbuhannya makin cepat.

### **3. Hub Inovasi Produk Digital Kreatif, dan Barang Seni**

BDI Denpasar menjadi hub atau pusat pengembangan produk, dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti perguruan tinggi, industri, serta komunitas.

Sebagai hub inovasi produk, BDI Denpasar juga menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara inovator dengan pengguna inovasi.

Inovasi atau pengembangan produk yang dilakukan harus sesuai dengan spesialisasi BDI Denpasar di bidang telematika dan aneka, dengan fokus pada sektor animasi, digital content, dan industrial internet of thing, serta untuk menunjang pertumbuhan industri berbasis aplikasi, permainan, dan kriya.

BDI Denpasar juga berperan sebagai showcase yang membuka akses pasar bagi produk inovasi tersebut, melalui kegiatan eksibisi, pameran, dan business matching yang dilaksanakan secara rutin di BDI Denpasar.

### **4. Hub Komunitas Industri Kreatif**

Pulau Bali memiliki keunggulan sebagai kawasan MICE yang telah dikenal oleh komunitas internasional. Keunggulan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dengan menjadikan BDI Denpasar yang berlokasi di Bali sebagai hub komunitas industri kreatif.

Bali saat ini menjadi tempat berkumpulnya digital nomad, atau pekerja digital yang terdiri dari freelancer dan remote worker, yang datang dari berbagai daerah dan negara. Digital nomad ini melakukan pekerjaannya dari Bali sembari menikmati alam, dan budaya Bali, serta biaya hidup yang lebih affordable bila dibandingkan dengan biaya hidup di negara asal mereka. Fenomena ini harus dimanfaatkan dengan membentuk hub komunitas industri kreatif, untuk memfasilitasi dan mewadahi para digital nomad ini bekerja dari Bali. Tujuannya agar para digital nomad ini tidak hanya membawa dampak bagi ekonomi lokal, namun juga bagi talenta lokal dan pengembangan jejaring kerja yang kuat antara para pekerja digital lokal dan internasional.

### **5. Sinergitas dengan Stakeholder dan Mitra Kerja**

Pengembangan BDI Denpasar sebagai pusat pengembangan industri kreatif melibatkan stakeholder dan mitra kerja. Stakeholder dan mitra kerja berperan sebagai lembaga yang bekerjasama dengan BDI Denpasar dalam penyelenggaraan diklat 3 in 1, penempatan lulusan, penyelenggaraan inkubator bisnis, penyedia akses pasar, akses pendanaan wirausaha binaan, dan akses pengembangan produk industri kreatif. Untuk mengembangkan sinergitas ini BDI Denpasar harus aktif melakukan pendataan asosiasi, dan komunitas yang kegiatannya sesuai dengan bidang spesialisasi BDI Denpasar.



# BAB III

## RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini merupakan pembabakan dan penjabaran dari Renstra BDI Denpasar, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan BDI Denpasar selama satu tahun. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi RKT 2025, Bdi Denpaar menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan. Pada tahun 2025 BDI Denpasar telah menetapkan sasaran program yang akan dilaksanakan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

### 3.1

#### Perjanjian Kinerja 2025

Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Tj	Meningkatnya peran SDM Industri dalam perekonomian nasional	1 Tersedianya SDM industri yang kompeten	167	Orang

### Perspektif Stakeholder

Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK1	<b>Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Dalam Penumbuhan Sektor Industri Manufaktur</b>	1 Persentase Lulusan Peserta Pelatihan yang Bekerja dalam 1 Tahun *	93	Persen
		2 Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi*	153	Orang
		3 Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh*	7	Tenant

### Perspektif Internal Process

Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK2	<b>Menguatnya Komponen Penunjang Produktivitas Industri</b>	1 Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91	Persen

### Perspektif Learn & Growth

Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK3	<b>Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Akuntabel serta Berorientasi pada Pelayanan Prima</b>	1 Nilai SAKIP	80,1	Nilai
		2 Nilai Laporan Keuangan	79	Nilai
		3 Nilai Profesionalitas ASN	81,3	Indeks
		4 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	Indeks
		5 Survey Kepuasan Masyarakat	3,25	Indeks
		6 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	75	Nilai
		7 Tingkat Penerapan SPBE	80	Persen
		8 Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	50	Persen

### 3.2 Program dan Anggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut maka direncanakan program dan anggaran sebagaimana yang ditunjukkan tabel 3.1 berikut:

Tabel 3-1: Program dan Anggaran TA 2024

Kode	Uraian	Jumlah
<b>019.10.DL</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>	<b>1,724,500,000</b>
<b>4957</b>	<b>Pelatihan Vokasi Industri</b>	<b>1,724,500,000</b>
4957.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	140,000,000
4957.BDB.001	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri	140,000,000
<b>051</b>	<b>Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sektor Industri</b>	<b>140,000,000</b>
A	Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi	72,844,000
B	Penyusunan MUK	47,922,000
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	180,000,000
4957.FAI.001	Dokumen Pendidikan Non Formal Industri Berbasis Kompetensi	180,000,000
<b>052</b>	<b>Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan Non Formal dengan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Lembaga Non-Pendidikan</b>	<b>180,000,000</b>
A	Pengembangan SDM BDI Denpasar	180,000,000
4957.QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	410,000,000
4957.QDJ.001	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	410,000,000
<b>051</b>	<b>Menyelenggarakan Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri</b>	<b>410,000,000</b>
A	Pra-Inkubasi	61,646,000
B	Inkubasi Bisnis Digital (7 Tim)	305,558,000
E	Pengembangan Pasca Inkubasi	32,561,000
F	Pengelolaan Makerspace	10,235,000
4597.SCH	Pelatihan Bidang Industri	994,500,000
4957.SCH.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)	994,500,000
<b>055</b>	<b>Pelatihan Industri (Skilling, Reskilling, Upskilling) Sistem 3 in 1 Sektor Industri Elektronika</b>	<b>940,257,000</b>
A	Multimedia Animator	176,196,000
B	Diklat Digital Marketing	179,139,000

Kode	Uraian	Jumlah
C	Desain Grafis 1	105,224,000
D	Desain Grafis 2	108,458,000
E	Social Media Marketing	100,064,000
F	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimens	271,176,000
<b>099</b>	<b>Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)</b>	<b>158,535,000</b>
A	Monitoring Evaluasi 1	16,920,000
B	Monitoring Evaluasi 2	22,749,000
C	Monitoring Evaluasi 3	14,574,000
<b>019.10.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>11,903,653,000</b>
<b>6043</b>	<b>Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri</b>	<b>11,903,653,000</b>
6043.CCL	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	63.870.000
6043.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan Komputer dan TIK	63.870.000
<b>051</b>	<b>Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer</b>	<b>63.870.000</b>
A	Pemeliharaan Jaringan dan Komputer	63.870.000
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11,353,653,000
6043.EBA.994	Layanan Perkantoran	11,306,215,000
<b>001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4,553,653,000</b>
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Relaksasi AA)	4,553,653,000
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>6,800,000,000</b>
A	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Diklat	1,722,316,000
B	Operasional Pimpinan dan Perkantoran	2,623,030,000
C	Pengolaan Asrama	70,000,000
D	Jasa Keamanan dan Kebersihan	1,908,360,000
E	Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional	476,294,000
6043.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	486,130,000
6043.EBD.004	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat Industri	486,130,000
<b>051</b>	<b>Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran</b>	<b>105,980,000</b>
A	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	36,752,000
B	Penyelenggaraan Pengelolaan SAKIP	38,092,000
C	Penelaahan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal	31,136,000

Kode	Uraian	Jumlah
<b>052</b>	<b>Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi</b>	<b>69,304,000</b>
A	Promosi, Sosialisasi, dan Pelayanan Publik	69,304,000
<b>053</b>	<b>Pengelolaan keuangan</b>	<b>28,794,000</b>
A	Pengelolaan Keuangan	28,794,000
<b>054</b>	<b>Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>70,519,000</b>
A	Audit surveillance	67,019,000
B	Pengambilan Sumpah Jabatan	3,500,000
<b>055</b>	<b>Pelayanan umum dan perlengkapan</b>	<b>226,741,000</b>
A	Penyelenggaraan Ketatausahaan	118,620,000
B	Pembinaan Manajemen Risiko	23,470,000
C	Pengembangan Monitoring Zona Integritas	34,700,000
D	Pembinaan Kearsipan	34,743,000
	<b>TOTAL</b>	<b>13,628,153.000</b>

Balai Diklat Industri Denpasar dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP-DIPA-019.10.2.579342/2025 tanggal 02 Desember 2024.

Selama tahun anggaran 2025, sampai RENKIN ini disusun terjadi 1 kali revisi yang berpengaruh pada terlaksananya kegiatan yakni pemblokiran anggaran terkait kebijakan efisisensi, sesuai Surat Kepala BPSDMI Nomor 28/BPSDMI/PR/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

KRO	Jumlah Pagu	Blokir	Pagu Aktif
4957.BDB	140.000.000	140.000.000	0
4957.FAI	180.000.000	130.000.000	50.000.000
4957.QDJ	410.000.000	245.000.000	165.000.000
4957.SCH	994.500.000	409.500.000	585.000.000
6043.CCL	63.870.000	13.870.000	50.000.000
6043.EBA	11.353.653.000	2.827.155.000	8.526.498.000
6043.EBD	486.130.000	446.130.000	40.000.000
	<b>13,628,153.000</b>	<b>4,211,655.000</b>	<b>9,416,498.000</b>

Sehingga dari total pagu Rp13.628.153.000,00 hanya dapat dimanfaatkan sebesar Rp9.416.498.000,00 atau 69% dari total pagu 2025, untuk menunjang tercapainya seluruh indikator kinerja.

### **3.3 Rencana Aksi**

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 dibutuhkan RencanaAksi yang merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang akan digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaranyang telah ditetapkan. Rencana aksi yang ingin dicapai BDI Denpasar tahun 2024 tersebut sebagai berikut:

# Rencana Aksi Balai Diklat Industri Denpasar Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sat.	Target (%)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
						Rencana Kegiatan	Target (%)						
1		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Dalam Penumbuhan Sektor Industri Manufaktur	Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi*	153	Orang	50%	7	8	9	10	11	12	13

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sat.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV			
					Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyajikan pelaksanaan kegiatan Inbis secara optimal</li> </ul> <p>Pra-Inkubasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan kegiatan untuk menjaring calon tenant</li> <li>Mengadakan kegiatan workshop</li> </ul>	8	<p>Pra-Inkubasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan seleksi calon tenant secara daring ataupun turing</li> <li>Melakukan kegiatan workshop</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inkubasi:</li> <li>Melakukan mentoring dan bootcamp</li> </ul>	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inkubasi &amp; Pascainkubasi:</li> <li>Melakukan mentoring dan bootcamp</li> <li>Melakukan promosi produk tenant</li> <li>Melakukan pameran-pameran</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi secara efisien</li> </ul>	12	13

Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Dalam Penumbuhan Sektor Industri Manufaktur

Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri yang Tumbuh\*

No	Satuan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sat.	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
											Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS</b>														
Sk2	Menguatnya Komponen Penunjang Produktivitas Industri	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91	Persen	25%									
<b>PERSPEKTIF LEARN &amp; GROW</b>														
Sk3	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta Berorientasi pada Pelanggan Primera			Nilai SAKIP	80,1	Nilai	0%							



No	Satuan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sat.	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV	
					Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	Indeks	25%	• Pelaksanaan anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku	50%	• Pelaksanaan anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku	75%	• Pelaksanaan anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100%	• Pelaksanaan anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100%	• Pelaksanaan anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100%	• Pelaksanaan anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku
	Survey Kepuasan Masyarakat	3,25	Indeks	25%	• Melaksanakan persiapan survei kepuasan masyarakat • Melaksanakan kegiatan publikasi dan kelumasan	50%	• Melaksanakan survei kepuasan semester I Evaluasi • Melaksanakan kegiatan publikasi dan kelumasan	75%	• Melaksanakan survei kepuasan masyarakat • Melaksanakan kegiatan publikasi dan kelumasan	100%	• Melaksanakan survei kepuasan masyarakat • Melaksanakan kegiatan publikasi dan kelumasan	100%	• Melaksanakan survei kepuasan masyarakat • Melaksanakan kegiatan publikasi dan kelumasan	100%	• Melaksanakan survei kepuasan masyarakat • Melaksanakan kegiatan publikasi dan kelumasan
	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta Benar-fentasi pada Pelayanan Prima	Sk3	Nilai Hasil Pengawasán Kearsipan	75	Nilai	25%	• Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan baik, dan mengupayakan sumber daya karsipan yang kompeten dan memenuhi syarat di triwulan I	50%	• Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan baik, dan mengupayakan sumber daya karsipan yang kompeten dan memenuhi syarat di triwulan II	75%	• Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan baik, dan mengupayakan sumber daya karsipan yang kompeten dan memenuhi syarat di triwulan III	100%	• Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan baik, dan mengupayakan sumber daya karsipan yang kompeten dan memenuhi syarat di triwulan IV	100%	• Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan baik, dan mengupayakan sumber daya karsipan yang kompeten dan memenuhi syarat di triwulan IV
	Tingkat Penerapan SPBE	80	Persen	25%	• Melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE secara mandiri	50%	• Melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE secara mandiri	75%	• Melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE secara mandiri	100%	• Melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE secara mandiri	100%	• Melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE secara mandiri	100%	• Melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE secara mandiri

No	Satuan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sat.	Target (%)	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
						Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
SK3	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta Akuntabilitas dan Konsentrasi pada Pelayanan Prima	Rekomendasi Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	50 Persen	25%	• Meningkatkan keberlanjutan dari tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya	50%	• Menganalisa hasil temuan dan melakukan penyelesaikan tindak lanjut hasil temuan audit secara tepat waktu	100%	100%	• Menganalisa hasil temuan dan melakukan penyelesaikan tindak lanjut hasil temuan audit secara tepat waktu	100%	• Menganalisa keberlanjutan dari tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya	

Kepala Balai Diklat Industri Denpasar



Arga Mahendra